



Pemkot Cermati Data Administratif

● Menuju Penilaian Kota Layak Anak

YOGYA, TRIBUN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta tengah melakukan berbagai persiapan untuk penilaian Kota Layak Anak (KLA).

Kepala DPMPPA Kota Yogyakarta, Edy Muhammad mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pencermatan secara administratif. Data tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan pusat dalam penilaian.

"Kami sedang input data, yang menjadi bagian administrasi. Nanti akan dilakukan pencermatan oleh pusat dan nanti akan dicek langsung di lapangan," katanya saat jumpa pers di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (19/3).

Ia melanjutkan, saat ini kelengkapan administrasi menjadi kendala, terutama terkait dengan sertifikat dan data-data lain. Pada penilaian KLA sebelumnya, DPMPPA Kota Yogyakarta melakukan self assessment. Dalam self assessment tersebut, Kota Yogyakarta mendapat poin 956. Dengan poin tersebut seharusnya Kota Yogyakarta mendapat predikat Kota Layak Anak.

Namun dalam penilaian pusat, Kota Yogyakarta mendapat poin 700an, sehingga Kota Yogyakarta mendapat kategori Nindya. "Kan ada tingkatan-nya, Madya itu nilai 600-700, Madya nilai 700-800, Utama nilai 800-900, Kota Layak Anak nilai 900-100. Ada beberapa administrasi yang membuat kita gugur. Misalnya Taman Pintar disebut ramah anak, tetapi saat dicek tidak ada sertifikatnya. Taman Bakung disebut ruang bermain ramah anak, tetapi tidak ada sertifikatnya. Jadi turun terus, dapat mulai 700an," lanjutnya.

Tidak hanya secara administratif, penilaian Kota Layak Anak juga didasarkan pada implementasi. Mulai dari peraturan, fasilitas, dan pemahaman ramah anak.

Peran primer

Sementara itu, Komisioner Bidang Mediasi dan Pengaduan KPAID Kota Yogyakarta, Hari Muryanto mengatakan untuk menjadi Kota Layak Anak harus memfungsikan orang tua dan keluarga. Ia menilai saat ini telah terjadi pergeseran pola asuh.

Hari menerangkan zaman dahulu ne-

nek masih memiliki peran dalam sosialisasi primer. Namun kemudian pola asuh bergeser dimana hanya keluarga inti saja yang berperan dalam ketahanan keluarga. Dengan seiring meningkatnya kasus perceraian, maka pola asuh menjadi *single family* atau *single parent*.

"Parenting harus kuat. Apalagi orangtua milenial saat ini yang cenderung membebaskan anaknya. Di tengah arus informasi yang deras, orang tua harus ikut dalam literasi. Karena informasi yang diterima anak-anak akan dicerna mentah-mentah. Jadi diperlukan pendampingan orang tua," terangnya.

Sebagai komisioner KPAID Kota Yogyakarta, ia ingin agar informasi yang diterima anak juga mengedepankan aspek ramah anak. Ia mendorong adanya forum anak dan memberikan literasi pada anak terkait aplikasi dan informasi yang ramah anak.

"Anak SD bahkan sudah bisa akses video porno, yang bahkan orangtua tidak tahu. Maka perlu ada informasi yang ramah anak, dengan bimbingan orangtua. Anak-anak sekarang kalau tanya sama temannya," ujarnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005